



Dadang Solihin
Rektor Universitas Darma Persada



Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



Dialog Rektor dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat
Istana Bung Hatta-Bukittinggi, 9 Maret 2018



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>



Materi

- Peran dan Fungsi DPRD
- Orientasi Dasar Politik DPRD
- Siklus Manajemen Pembangunan
- Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Daerah
- Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah
- Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019
- Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN: Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sumatera Barat



Peran dan Fungsi DPRD



Wadah Perwakilan Rakyat



Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat



DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat



Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat



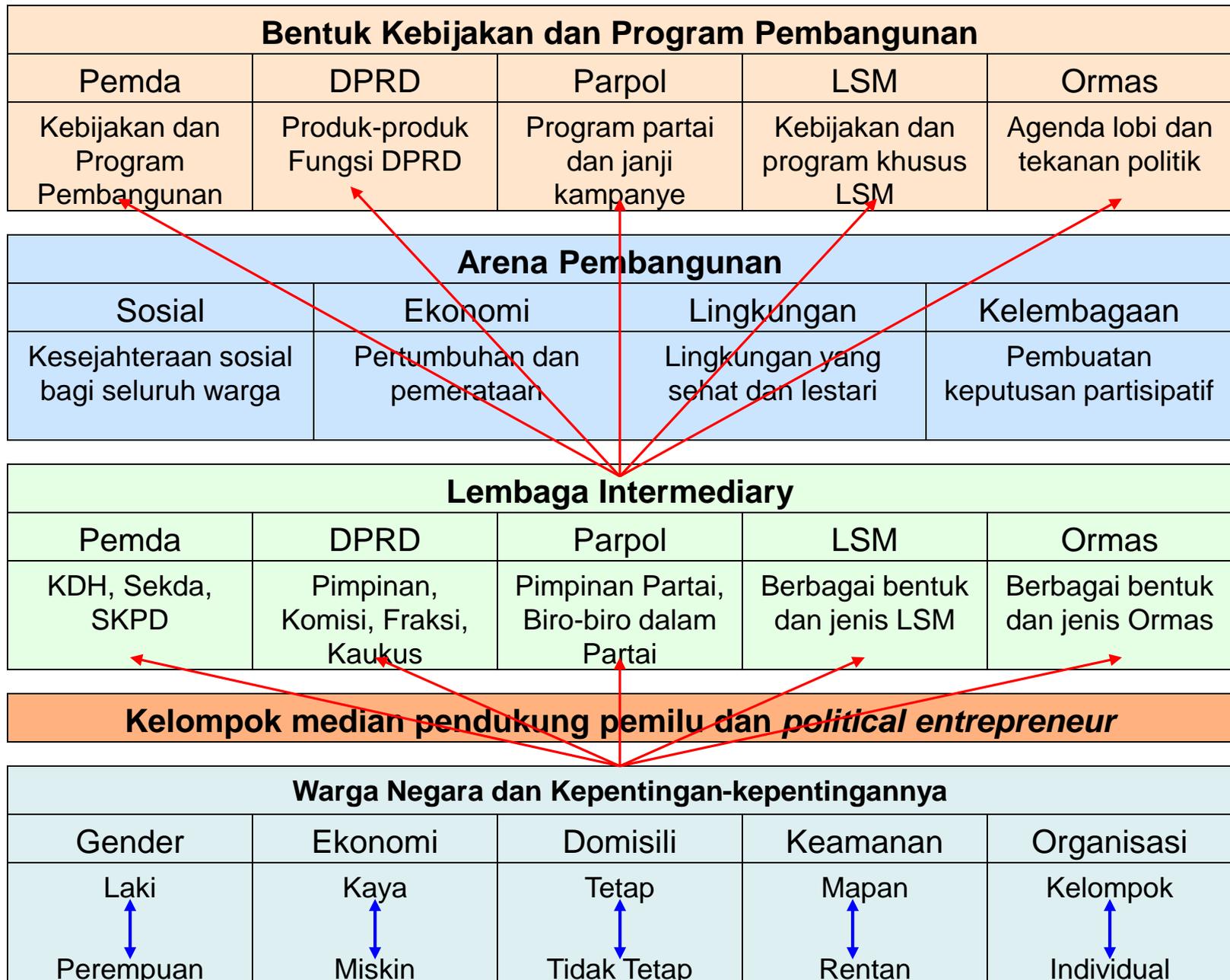
LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu



Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional

- ❑ Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?
- ❑ Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?
- ❑ Lembaga dan organisasi mana yang mempunyai sumberdaya pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata dan cepat memenuhi kebutuhan hidup rakyat?
- ❑ Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan



Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD menurut UU 17/2014

1.

Legislasi

2.

Anggaran

3.

Pengawasan

Fungsi Legislasi

- **Fungsi Legislasi** adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
- Perda akan menjaga keberlanjutan sebuah kebijakan di daerah.
- Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah.
- Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.

Fungsi Anggaran

- **Fungsi Anggaran** adalah kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
- APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan pemerintah daerah.
- APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
- Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: **“kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”**.

Fungsi Pengawasan

- **Fungsi Pengawasan** adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- Adanya pelayanan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya kebijakan daerah yang progresif memihak masyarakat.
- Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah.



Orientasi Dasar Politik DPRD



Agenda Politik Nyata



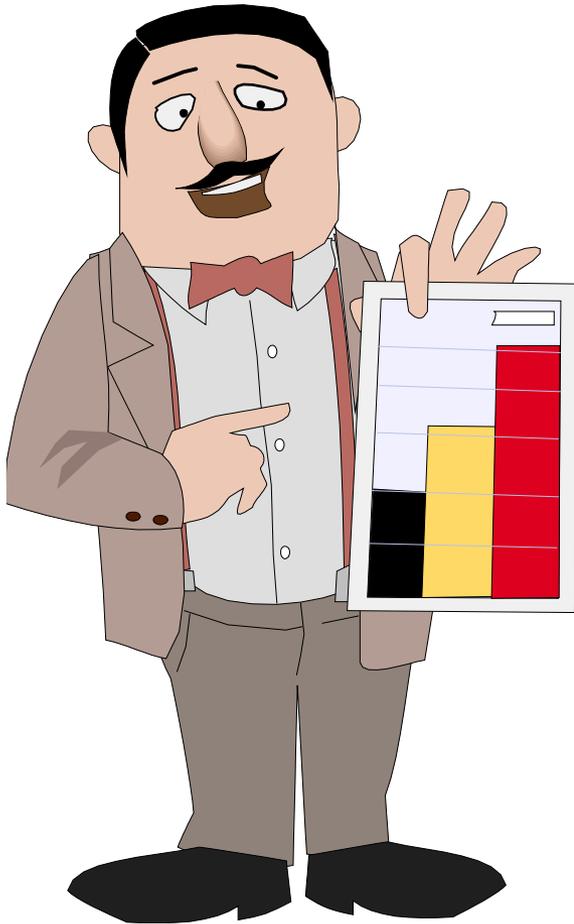
Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.

- ❑ Penanggulangan kemiskinan;
- ❑ Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- ❑ Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Argumentasi Politik Mendasar

Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise.

- ❑ Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
- ❑ Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.



Positif dan Konstruktif

Pemikiran yang selalu mencari upaya perbaikan.

- ❑ Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir **positif** dan **konstruktif** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- ❑ Sering tanpa disadari kebiasaan ini justru meningkatkan kapasitas modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur politik pendukungnya.



Membangun Sistem Umpan Balik



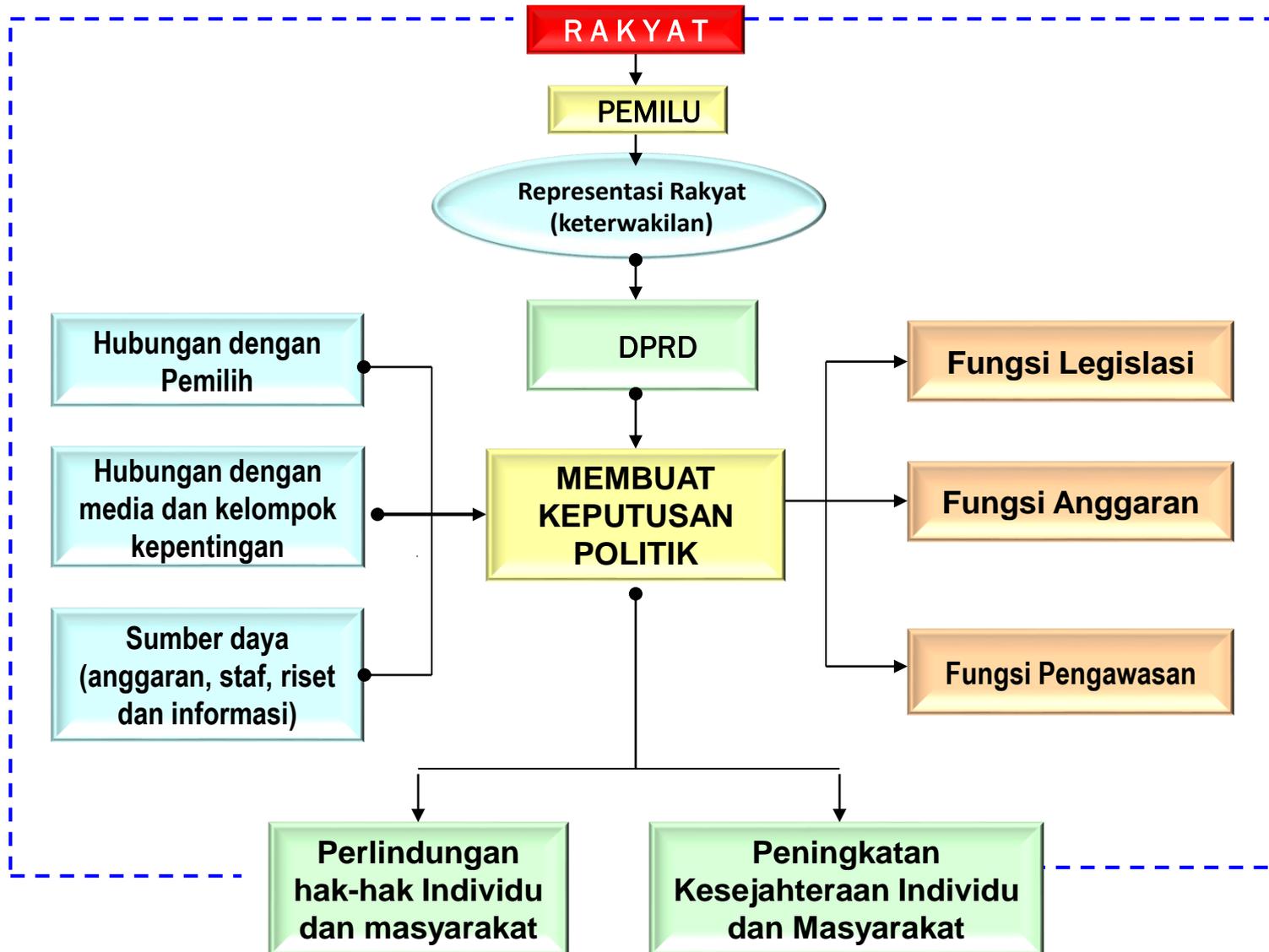
Membangun dan memperkuat sistem umpanbalik yang cepat dan efektif.

- ❑ Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan *update* terhadap informasi dan program kerjanya.
- ❑ Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut juga secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di tingkat akar rumput atau justru berkembang menjadi partai politik yang mengambang.

Siklus Representasi Wakil Rakyat

- ❑ Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
- ❑ Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
- ❑ Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.
- ❑ Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik.

Siklus Representasi Wakil Rakyat



Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

- ❑ Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
- ❑ Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.
- ❑ DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-individu warga negara.

Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik

- ❑ Secara substansial
 - perlindungan hak
 - peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
- ❑ Secara prosedural
 - mengikuti prosedur hukum yang benar
 - melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
- ❑ Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
- ❑ Sistem pendukung (*supporting system*) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.

Siklus Manajemen Pembangunan





Perencanaan Pembangunan Daerah



Proses Perencanaan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)

NASIONAL		DAERAH	
Dokumen	Penetapan	Dokumen	Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)	UU (Ps. 13 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)	Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional)	Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)	Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)	Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)	Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)	Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)	Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 21 Ayat 3)

Persyaratan Dokumen Perencanaan: **SMART**

- **SPECIFIC**-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
- **MEASUREABLE**-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
- **ACHIEVABLE**-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
- **RELEVANT** (information needs of the people who will use the data)
- **TIMELY**-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

Syarat Perencanaan

Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan

- Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders
- Sebagai penuntun arah
- Minimalisasi ketidakpastian
- Minimalisasi inefisiensi sumberdaya
- Penetapan standar dan pengawasan kualitas





Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah



Apa Itu Pembangunan?

Pembangunan adalah:

- proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik
- melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tujuan Pembangunan:

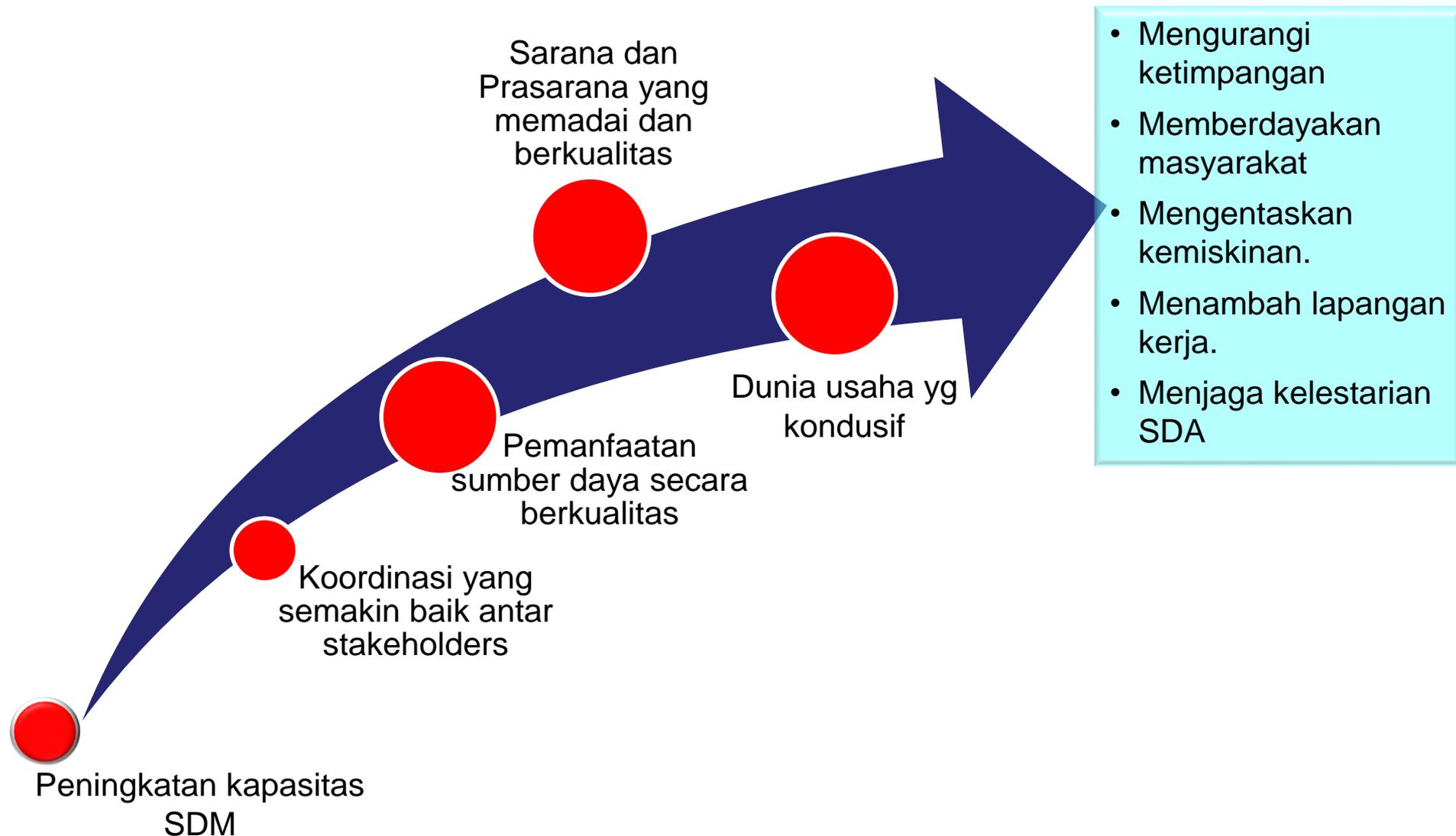
1. **Peningkatan standar hidup (*levels of living*)** setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.
2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan **tumbuhnya rasa percaya diri (*self-esteem*)** setiap orang.
3. **Peningkatan kebebasan (*freedom/democracy*)** setiap orang.

Today, 2000

How?

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 - antar daerah
 - antar sub daerah
 - antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

Tantangan dalam Pembangunan Daerah



PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH



Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang **andal** dan **profesional** dalam:

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat,
- Mengelola sumber daya ekonomi daerah.



Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

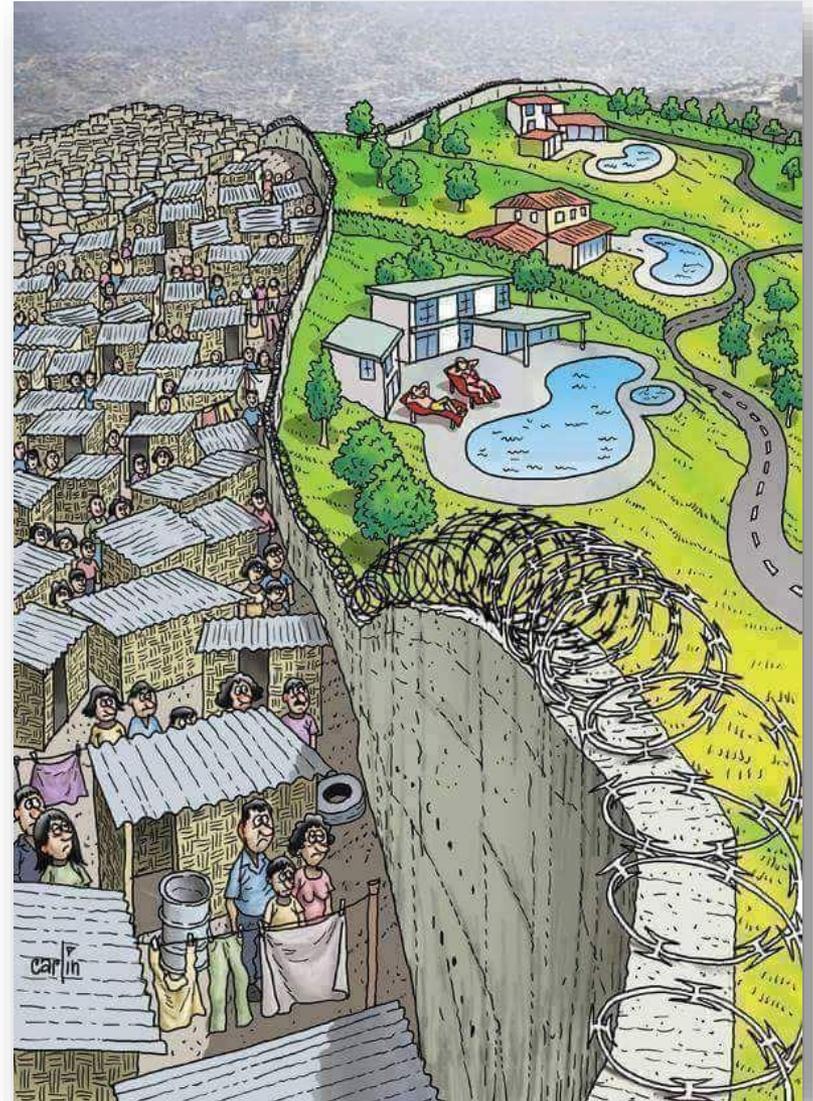
Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk:

- Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram,
- Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

PEMBANGUNAN DAERAH



PEMBANGUNAN DI DAERAH



PEMBANGUNAN DAERAH

Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga Pilar

Pemerintahan

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain.

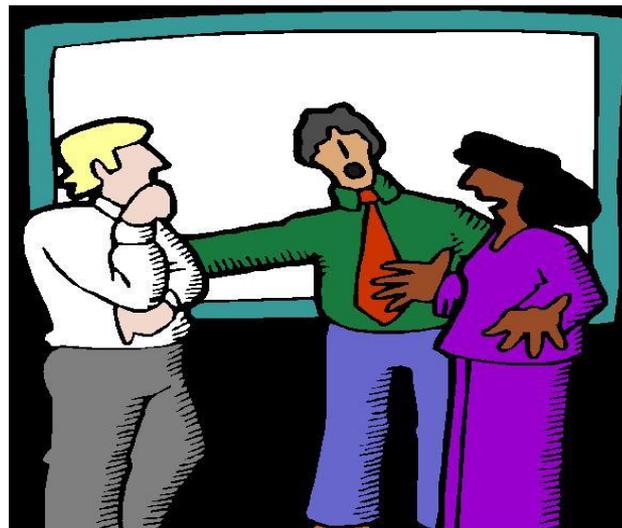
Dunia Usaha

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Masyarakat

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Pergeseran Paradigma: *From Government to Governance*



Government

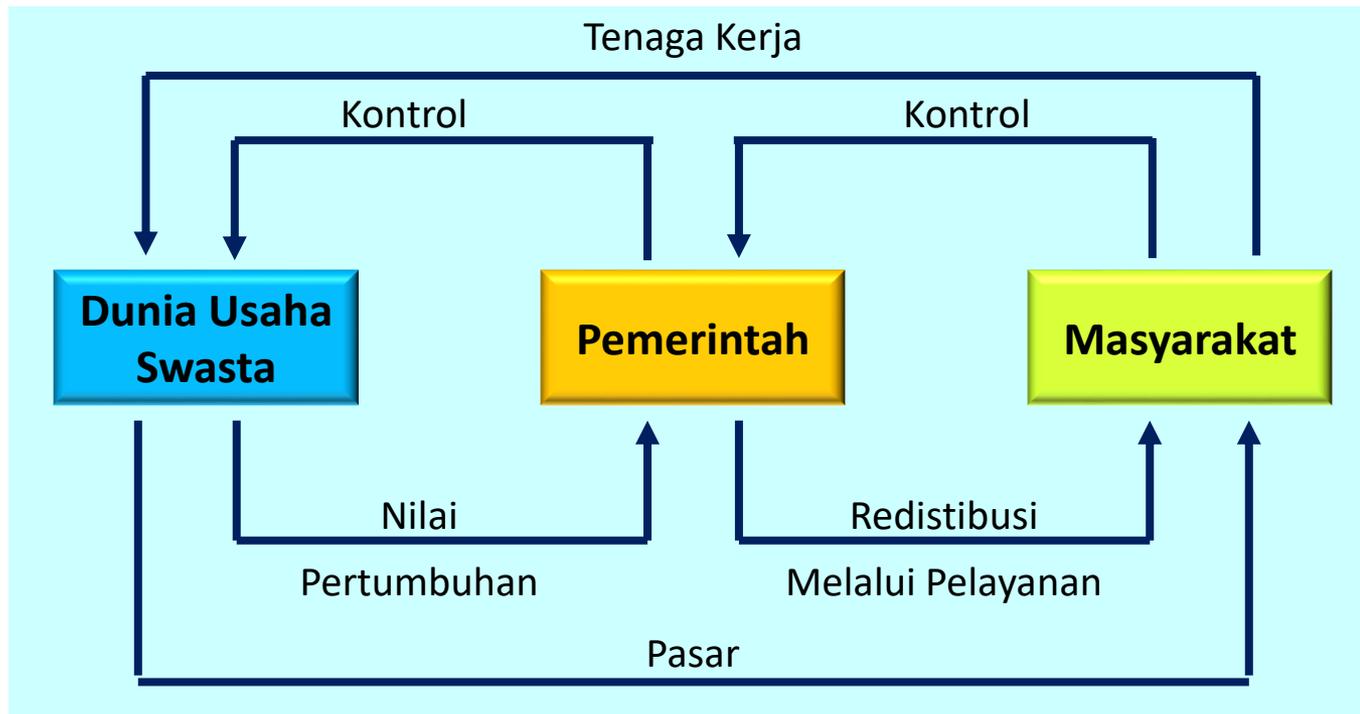
- Memberikan hak eksklusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik,
- Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.

Governance

- Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, *civil society* dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

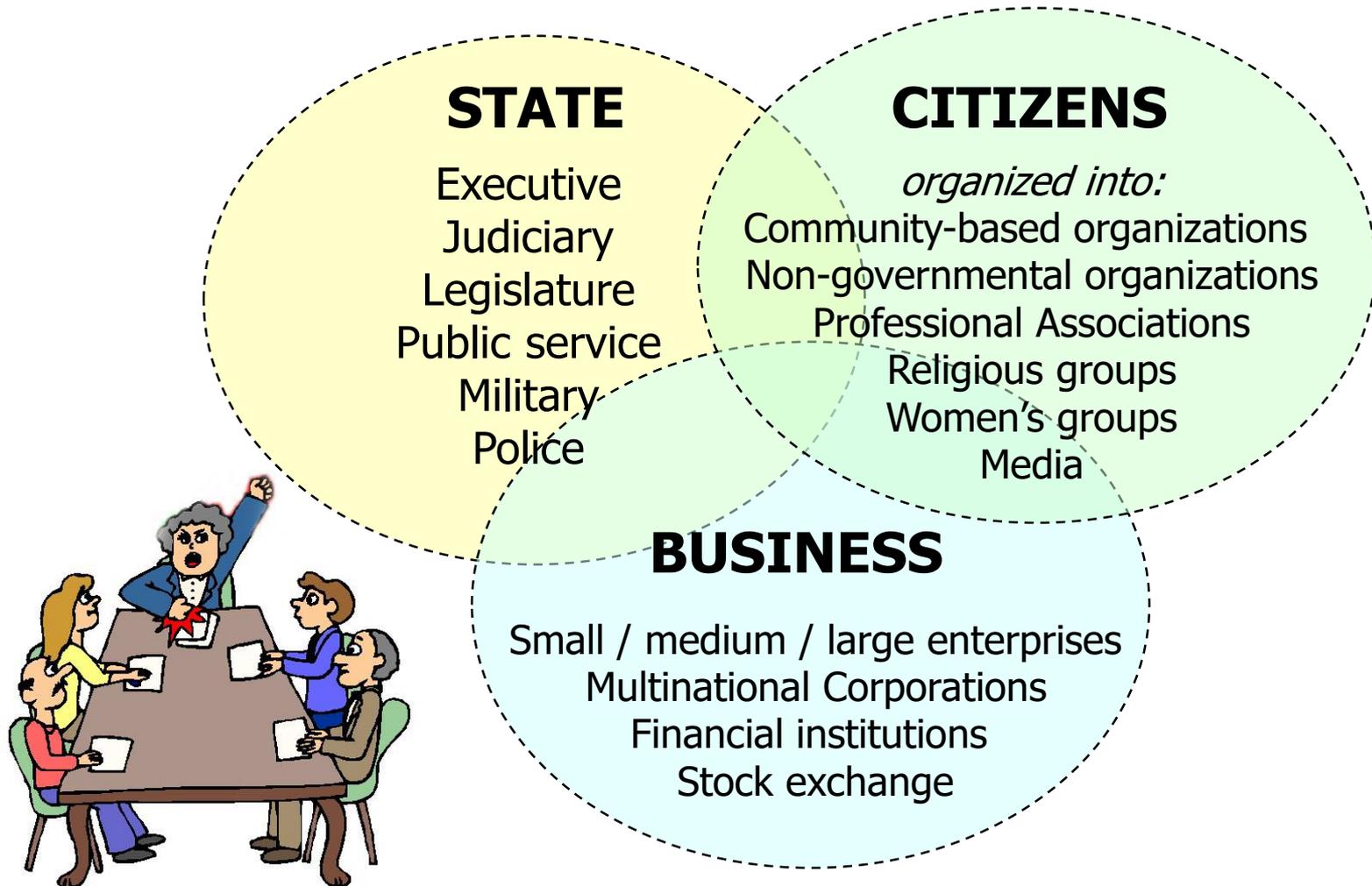
Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance

- ❑ Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.



- ❑ Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka **Governance** akan **Good**.

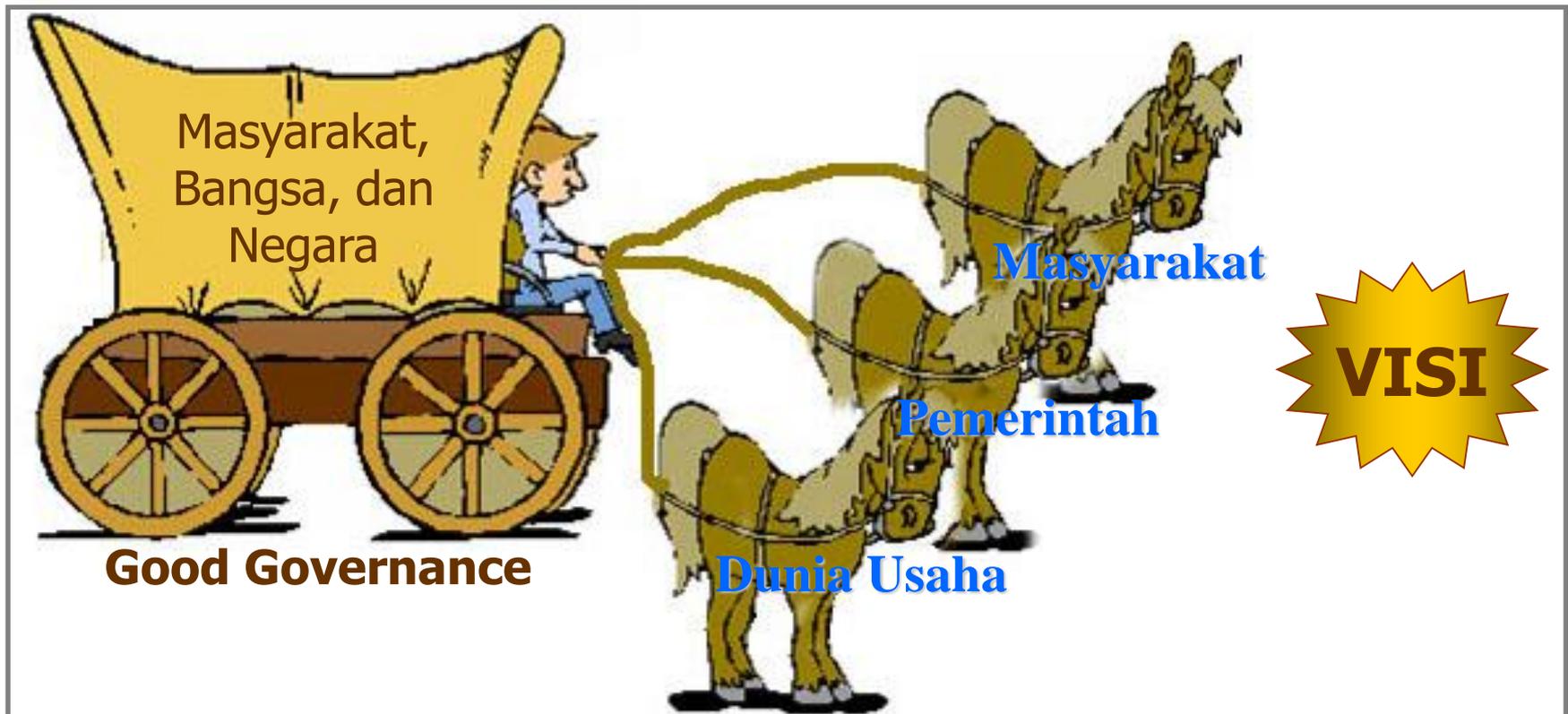
Pelaku Pembangunan: Stakeholders



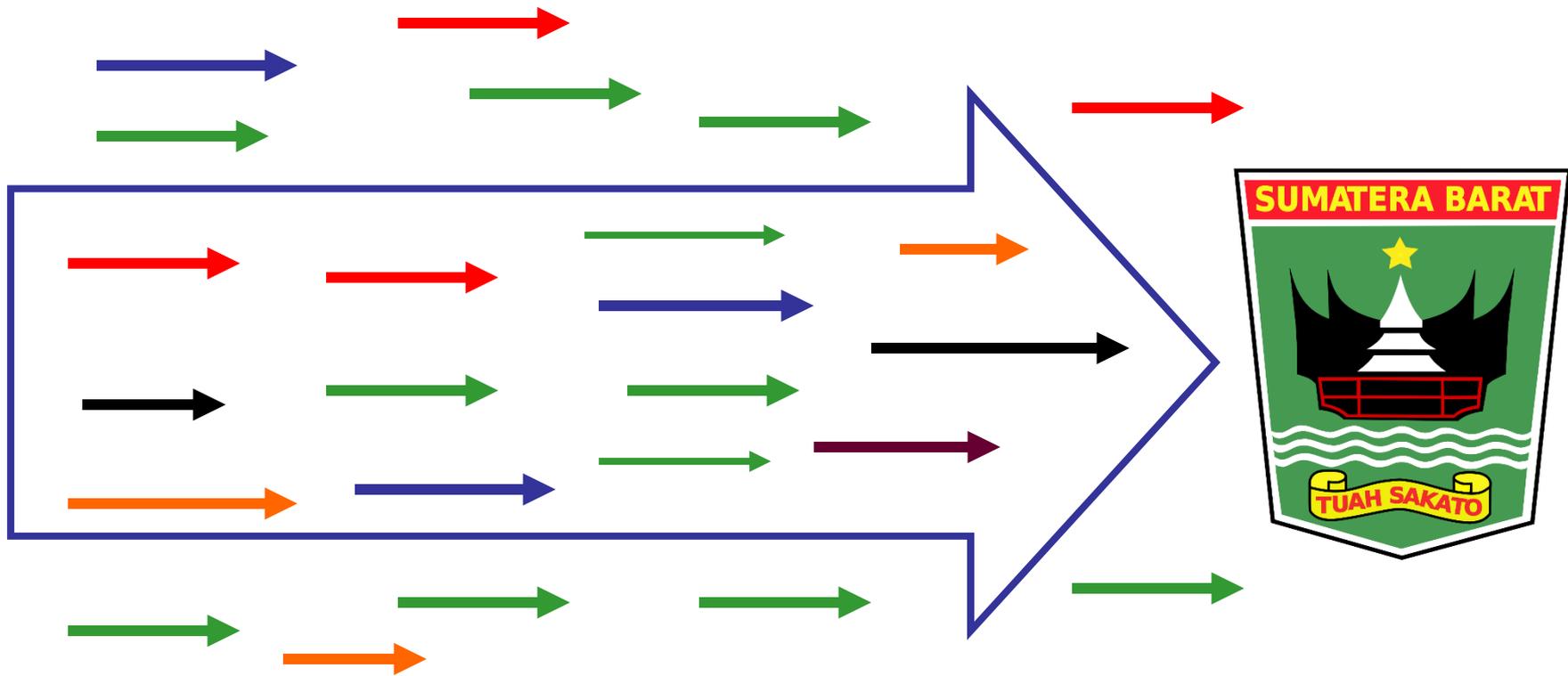
Troika



Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat



Sinergi Stakeholders





Penyelarasan RPJMD-RPJMN 2015-2019

Penyelarasan Sasaran Makro

Indikator	Target RPJMD	Target RPJMN
Pertumbuhan Ekonomi		
Tingkat Pengangguran		
Tingkat Kemiskinan		



Penyelarasan Sasaran Pokok

Sasaran	Ya	Tidak	Target RPJMD	Rekomendasi Target (hingga akhir periode RPJMD)
I. Sasaran Makro				
Pembangunan Manusia dan Masyarakat				
1. Indeks Pembangunan Manusia				
2. Indeks Pembangunan Masyarakat				
3. Indeks Gini				
4. Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan				
4. Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan				
- Pekerja Formal				
- Pekerja Informal				
Dst...				

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	5.6	5.8	6.0	6.2	6.2
Sumatera Utara	6.1	6.7	7.2	7.6	8.1
Sumatera Barat	5.4	6.0	6.4	7.0	7.8
Riau	4.6	4.9	5.1	5.8	6.8
Kepulauan Riau	6.7	7.4	7.0	7.5	7.5
Jambi	6.5	7.0	7.4	8.1	8.9
Sumatera Selatan	5.8	6.1	6.2	6.7	7.5
Kep. Bangka Belitung	5.5	6.1	6.8	7.1	7.5
Bengkulu	5.9	6.7	7.3	7.7	8.4
Lampung	6.2	6.8	7.2	7.7	8.2

Sasaran Tingkat Kemiskinan Wilayah Sumatera Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	16.2	14.9	13.7	12.5	11.3
Sumatera Utara	9.2	8.7	8.1	7.4	6.7
Sumatera Barat	6.7	6.2	5.8	5.3	4.8
Riau	7.0	6.4	5.8	5.3	4.7
Kepulauan Riau	5.1	4.6	4.3	3.8	3.4
Jambi	5.9	5.4	5.0	4.6	4.2
Sumatera Selatan	12.2	11.3	10.4	9.5	8.6
Kep. Bangka Belitung	3.9	3.6	3.3	3.0	2.7
Bengkulu	14.7	13.6	12.5	11.4	10.3
Lampung	14.1	13.6	12.6	11.5	10.5

Sasaran Tingkat Pengangguran Wilayah Sumatera Per Provinsi 2015-2019

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Aceh	8.5	8.2	7.9	7.5	7.2
Sumatera Utara	6.0	5.8	5.6	5.3	5.2
Sumatera Barat	6.1	5.9	5.7	5.4	5.2
Riau	3.8	3.7	3.5	3.3	3.1
Kepulauan Riau	5.1	4.8	4.6	4.3	4.1
Jambi	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6
Sumatera Selatan	5.5	5.3	5.1	4.9	4.7
Kep. Bangka Belitung	3.3	3.1	3.0	2.9	2.7
Bengkulu	3.4	3.3	3.1	3.0	2.9
Lampung	4.9	4.7	4.6	4.4	4.3



Simulasi Penyelarasan RPJMD-RPJMN

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Sumbar

PERKERETAAPIAN DIPERUNTUKKAN BAGI PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Jalur KA Padang Panjang - Bukit Tinggi- Payakumbuh2. Pembangunan Jalur KA Shortcut Padang - Solok3. Pembangunan jalur KA antara Duku – Bandara Internasional Minangkabau4. Reaktivasi jalur KA antara Pariaman - Naras5. Reaktivasi jalur KA antara Muaro Kalaban - Muaro	

PERHUBUNGAN DARAT

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
1. Pengembangan Sistem Transit dan Semi BRT Kota Padang*	

PERHUBUNGAN UDARA

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
1. Pengembangan Bandara Minangkabau 2. Pengembangan Bandara Rokot	

PERHUBUNGAN LAUT

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
1. Pengembangan Pelabuhan Cerocok Painan 2. Pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, Padang* 3. Pengembangan Pelabuhan Tiram 4. Pengembangan Pelabuhan Pasapat	

JALAN

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan Jalan P. Sipora2. Pembangunan Jalan Sicincin-Lb.Alung3. Pembangunan Jalan Tapan-Bts Jambi4. Pembangunan Jalan Tiku-Sasak-Air Bangis-Bts.Prov Sumut5. Pembangunan Jalan Balinka-Matur-Ngarai Sihanouk (Jembatan & Terowongan)6. Pembangunan Jalan Sieberut - Muara Sigep7. Pembangunan Jalan Mara - Sioban - Taopejat8. Pembangunan Jalan Padang - Mukomuku9. Pembangunan Jalan Padang Panjang – Solok10. Pembangunan Jalan Kiliranjao - Teluk Kuantan11. Pembangunan Jalan Kiliranjao – Bangko12. Pembangunan Jalan Padang Bypass	

ASDP

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tua Pejat2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sikakap3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Danau Ombilin*4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pagai Selatan*5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Padang	

KETENAGALISTRIKAN

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
1. PLTP Muara Laboh (FTP2) 70 MW 2. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	

TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota 2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI	

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian Banjir Batang Sianok Kab. Agam2. Pembangunan DI. Batang Sinamar3. Pembangunan DI. Sawah Laweh Tarusan (3273 Ha)4. Pemb. DI Kawasan Batang Bayang5. Pemb. DI Kawasan Bandar Ubo Solok (3.2000 ha)6. Pemb.D.I. Kawasan Lubuk Buaya (3362 Ha)7. Peningkatan DI. Koto Salapan (Areal Air Tambang-Sungai Tunu)8. Anai River Channel Improvement From River Mouth to Section50 M Up Strem Bypass Bridge di Kab. Padang Pariaman (0,15 Km)9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Prasarana Pengendali Banjir Batang Kuranji	

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
10. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tapakis	
11. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Lumbo Pesisir Selatan	
12. Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Batang Tandikek	
13. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Lurus Kota Padang	
14. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Pasaman	
15. Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Batang Kampar	
16. Pembangunan Prasarana Pengendali Sedimen Batang Sanipan	

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
17. Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Air Dingin	
18. Pembangunan Check Dam dan Perkuatan Tebing Bt. Kuranji-Limau Manis Kota Padang	
19. Pembangunan Bangunan Terjun dan Perkuatan Tebing Bt. Timbalun Bungus Kota Padang	
20. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Padang Pariaman	
21. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sasak Pasaman Barat	
22. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai luhung-bayang-Api-api-Ketaping-Sago Pesisir Selatan	
23. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Sumedang Pesisir Selatan	

SUMBER DAYA AIR

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
24. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Air Haji Pesisir Selatan	
25. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Amping Parak Pesisir Selatan	
26. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai Bungus Padang	
27. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengamanan Pantai Padang di Kota Padang	
28. Danau Singkarak Kab. Solok	
29. Danau Dibawah Kab. Solok	
30. Pembangunan Bendung DI. Lubuk Malako Kabupaten Solok selatan (MYC) Kab. Solok Selatan	
31. Pembangunan Jaringan Tersier DI. Lubuk Malako di Kab. Solok Selatan Kab. Solok Selatan	
32. Pembebasan Tanah DI. Lubuk Malako Kabupaten Solok Selatan Kab. Solok Selatan	

PENDIDIKAN

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
1. Pembangunan SMK Kelautan 2. Pembangunan SMA	

KESEHATAN

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
1. Peningkatan kapasitas BP4 menjadi RS rujukan regional khusus untuk paru	

PERUMAHAN

RPJMN	RPJMD Prov Sumbar
<ol style="list-style-type: none">1. Proses pembebasan lahan untuk asrama haji embarkasi di Padang Pariaman sudah selesai dilaksanakan2. Bantuan lanjutan pembangunan Masjid Raya (Islamic Center) Padang	

Terima Kasih

